

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SLEMAN**

TESIS



Disusun oleh :

D A K I R I

NIM. 243110024

**MAGISTER ILMU EKONOMI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
TAHUN 2013**

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SLEMAN**

TESIS

Disusun oleh :

**D A K I R I
NIM. 243110024**

Yogyakarta, 2013

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Sri Suharsih, M.Si

Akhmad Syari'udin, SE. M.Si

KATA PENGANTAR

Selaksa Puji dan Syukur hanya pantas dihaturkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha segala Maha. Dengan karunia-Nya, Alhamdulillah penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan lancar. Tesis ini mengulas tentang analisis potensi pajak daerah dalam era otonomi sebagai suatu studi kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman.

Selain sebagai syarat lulus Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana UPN Yogyakarta, tesis ini ditulis karena kesadaran penyusun tentang pentingnya dasar yuridis dalam memungut pajak. Serta penerapan otonomi daerah yang membawa dampak perubahan bagi pengaturan sektor perpajakan daerah. Tentunya dalam melakukan semua itu penyusun tidak sendirian. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kemauan dan kemampuan sehingga penyusunan tesis ini bisa diselesaikan sesuai dengan harapan;
2. Ketua Program Pasca Sarjana UPN Yogyakarta dan staf Administrasi yang banyak menunjang dan membantu kelancaran dalam menempuh program ini.
3. Para Guru besar dan staf pengajar Program Magistar MIE UPN Yogyakarta yang telah memberikan perkuliahan secara professional, arif dan bijaksana dalam memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Ibu, istri , anak dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun sepiritual sekaligus memberikan semangat sehingga tugas akhir ini bias terselesaikan;
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.

Penyusun berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penyusun sendiri maupun pembaca yang berkenan mempelajarinya. Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari harapan, dan tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Sleman, Desember 2012

Penyusun

Dakiri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam era otonomi, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Selanjut dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Sementara dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, jumlahnya relatif yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pembelanjaan APBD-nya.(Wahyuni, 2010) Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,

termasuk diantaranya adalah *pajak daerah dan retribusi daerah* yang memang telah ada sejak lama.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan berbagai perubahan, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya.

Kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan bisa mensinergiskan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak.

Kebijakan pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Diantisipasinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi

daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Efektifitas sumber pendapatan daerah, akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan study ataupun penelitian yang memerlukan waktu yang panjang disamping membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Tabel 1.1
Prosentase Perbandingan PAD dan Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2007 - 2011

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	% PAD Terhadap Pendapatan Daerah
2007	94,896,446,720	816.494.692.325,50	15%
2008	106,758,631,343	805.345.499.944,00	18%
2009	128,918,153,264	838.951.446.878,00	19%
2010	163,530,209,690	1.096.171.526.063,21	15%
2011	203,457,903,768	1.311.785.453.371,45	17%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Tingginya transfer keuangan pusat dan daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), studi yang dilakukan oleh Usui (2004) sebagaimana dikutip oleh Yamin (2010) menunjukkan transfer pusat ke daerah lebih 80% sedangkan PAD hanya berkisar 10% dari total penerimaan daerah. Untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Sleman, selain mengandalkan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK) dan lain-lain pendapatan, juga dibiayai dari penerimaan daerah yang bersumber dari PAD. Dalam rangka terwujudnya ekonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah harus sekuat tenaga berusaha meningkatkan PAD.

Tabel 1.2
Persentase Perbandingan PAD dan DAU Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2007 - 2011

Tahun	PAD	DAU	% PAD Terhadap DAU
2007	116.318.458.068	543.085.000.000	22%
2008	139.202.343.051	592.594.528.000	25%
2009	159.533.111.231	587.857.778.000	27%
2010	163.599.097.641	563.320.892.000	29%
2011	218.957.333.977	631.920.733.000	35%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya sistem dan prosedur kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat membayar pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, dengan harapan dimasa yang akan datang bisa memperbesar persentase penerimaan daerah .

Perbandingan persentase penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total pendapatan daerah masih bisa dikatakan cukup berdasarkan tabel 1.3. Namun perlunya optimalisasi pajak daerah adalah untuk mengimbangi penerimaan dana alokasi umum, sehingga semua kegiatan pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan sesuai harapan.

Tabel 1.3
Persentase Perbandingan DAU dan Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2007 - 2011

Tahun	DAU	Total Pendapatan Daerah	% Total Pendapatan Daerah Terhadap DAU
2007	543.085.000.000	816.494.692.325,50	67%
2008	592.594.528.000	805.345.499.944,00	74%
2009	587.857.778.000	838.951.446.878,00	70%
2010	563.320.892.000	1.096.171.526.063,21	52%
2011	631.920.733.000	1.311.785.453.371,45	49%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Dari sekian banyak uraian tersebut diatas berikut kami sajikan data realisasi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman dari kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan 2011 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 - 2011

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Jumlah Pajak Daerah (Rp)
2004	28.327.600.000,00	30.715.060.955,07
2005	41.141.393.271,38	33.067.768.825,00
2006	37.979.313.74, 32	32.750.000.000,00
2007	50.287.665.731,91	42.000.000.000,00
2008	61.020.899.130,70	49.171.622.433,00
2009	71.044.731.106, 66	56.350.000.000,00
2010	80.611.542.955,52	75.969.096.600,00
2011	142.698.407.280,12	122.700.165.400,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Adanya signifikasi kenaikan perolehan pajak, ini menunjukkan pajak di Kabupaten Sleman sangat berpotensi untuk lebih diintensifkan. Sehingga perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak parkir sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.(Halim, 2007)

Besar kecilnya penerimaan pajak tentunya tidaklah sama mengingat obyek pajak dengan jangkauan yang berbeda. Sehingga besar kemungkinan hasil penerimaan dari obyek pajak tentunya akan berbeda pula, dengan kondisi tersebut tentunya akan berdampak langsung kegiatan pembiayaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan atau penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman terlebih dahulu harus mengetahui seberapa penerimaan pajak daerah yang penekanannya pada potensi riil mutlak dilakukan untuk menetapkan target rasionalnya. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan dengan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang maka akan dapat diperkirakan rencana, tindakan apa yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Kecenderungan yang selama ini dilakukan di Kabupaten Sleman terjadi terhadap penetapan anggaran pada pos pendapatan daerah, yaitu bahwa penetapan target-target dari setiap jenis pendapatan daerah hanya didasarkan atas proses *incremental* (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan pada potensi yang dimiliki. Apabila kesenjangan antara potensi dan realisasi dikatakan sebagai kesenjangan obyektif, maka upaya pengkajian terhadap potensi pendapatan daerah perlu dievaluasi dan perlu di kaji. Untuk meminimalisir kesenjangan obyektif tersebut tentunya tentunya harus dikaji ulang dengan

menghitung potensi riil dengan memperhatikan aspek proporsi dan pertumbuhan. Dengan pertimbangan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi semakin tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan, seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata.

Bentuk pemikiran mendalam tersebut tercakup dalam potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman. Dan dengan menggunakan obyek penelitian 11 pajak daerah yang berlaku sejak diberlakukan Undang-undang nomor 28 tahun 2009, yang dianalisis menggunakan lima tolok ukur pajak daerah yang telah diintrodusir oleh Nick Devas : *yield*, *ability to implement*, *equity*, *economic efficiency*, dan *suitability as a local source* maka diperoleh pokok-pokok pemikiran potensi pajak dan retribusi daerah, dilihat dari segi *yield* (hasil) semua pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman masih bisa ditingkatkan. Dan peningkatan tersebut tergantung dari *ability to implement* (kemampuan untuk melaksanakan), yang terlihat dalam usaha pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan *ability to implement* meningkat, maka *yield* juga akan meningkat.

Karena pajak merupakan sumber penerimaan daerah, perlu mendapat perhatian, mengingat pengelolaan pajak yang berada di wilayah Kabupaten Sleman belum seluruhnya digali secara optimal dan perlu ditingkatkan, sehingga perlu intensifkan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Artinya hasil penerimaan pajak di Kabupaten Sleman mendekati potensi yang seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat perekonomian. Alasan ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN “

1.2. Rumusan Masalah

Salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, penerimaan pajak daerah mempunyai kemampuan untuk lebih dintensifkan oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dengan membatasi pada pajak daerah. Permasalahan tersebut dapat dilihat

dengan rumusan masalah sebagai berikut : “ Bagaimana potensi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2007 - 2011

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan yang bersifat praktis terutama bagi para pengambil kebijakan pemerintah.

a. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam menganalisis pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu ekonomi pembangunan.

b. Secara praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang potensi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah;
- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut pajak daerah.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ditunjukkan dengan tabel tersebut dibawah.

Tabel 1.5
Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Sampel	Alat	Hasil
1.	Astuti (2008)	Gianyar	Regresi	1. Retribusi pelayanan kesehatan, pajak hotel dan restoran serta retribusi tempat rekreasi dan olah raga secara serempak berpengaruh signifikan terhadap

				<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar</p> <p>2. Retribusi pelayanan kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, pajak hotel dan restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, retribusi tempat rekreasi dan olah raga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD</p>
2.	Kurniawan (2010)	Ponorogo	Regresi	<p>Hasil dari retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah mempunyai jumlah sumbangan paling besar terhadap pendapatan asli daerah, hal ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah cukup besar. Walaupun pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah lebih kecil tetapi peran retribusi daerah terhadap jumlah pendapatan asli daerah sangat penting.</p>
3.	Ruswandi (2009)	Bogor	Estimasi Model dan Koefisien	<p>1 Selama periode tahun 1994 hingga tahun 1999, potensi pajak daerah di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2000 terjadi penurunan dan terjadi peningkatan kembali pada periode tahun 2001 hingga tahun 2006</p> <p>2 Masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terkait dengan upaya pencapaian realisasi pajak daerah sehingga pengaruh pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sumedang</p>

				masih relatif kecil bila dibandingkan dengan komponen lainnya yang berpengaruh terhadap PAD
--	--	--	--	---

Dari ketiga penelitian sebelumnya tersebut diatas ketiganya melakukan penelitian dengan menggunakan alat analisis yang berbeda. Sehingga hasil penelitian diperoleh hasil pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pengaruh tersebut persentasenya ada kuat dan ada yang lemah (besar dan kecil), secara keseluruhan persentase belum optimal, tetapi ada signifikansi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menggunakan alat analisis yang komperhensif yaitu pertumbuhan pajak, analisis variabel keadilan (*Equity*), kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*) dan variabel kesesuaian sebagai penerimaan daerah (*Suitability as a Local Source*).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam rangka melaksanakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sehingga tercipta suasana efektif dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk maksud tersebut dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upaya yang nyata dan bertanggungjawab melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah untuk membiayai biaya pembangunan.

Belum semua potensi pajak tergali secara maksimal, dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia serta kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan regulasi peraturan yang berlaku masih rendah, maka berupaya untuk melakukan reformasi baik secara administrasi maupun penyederhanaan prosedur pelayanan, sehingga diharapkan bisa menyadarkan arti pentingnya pajak terhadap kegiatan pembangunan.

Ditemuinya wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya (yang sudah jatuh tempo) maka perlu diintensifkan pelaksanaannya. Beberapa upaya dan terobosan untuk menyadarkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa memahami arti dan pentingnya pajak telah dilakukan baik melalui sosialisasi, pendekatan secara berjenjang kepada pengelola maupun yang lainnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman sehingga target penerimaan dari pajak dapat lebih optimal. Salah satu upaya adalah melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang telah jatuh tempo dengan memberikan penyuluhan atau dengan menyadarkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu patuh dan taat untuk membayar pajak untuk memperkuat kemampuan keuangan negara.

2.1. Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kemudian pengertian pajak menurut Rachmad Soemitro adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung.

Kemudian pendapat lain, Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Brotodiharjo, 2003)

Secara makro (regional) pengenaan pajak langsung yang pajaknya tidak dapat digeserkan akan mengurangi tingkat *disposable income* yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat, jika tingkat konsumsi masyarakat turun maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan regional dalam perekonomian daerah. (Halim, 2010)

Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public invesment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bugeter yaitu mengatur;

Kemudian menurut Abdul Halim, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat dan daerah;
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public invesment*;

Pemungutan pajak menurut Abdul Halim, hendaknya dilakukan secara proporsional, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaannya harus adil

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi warganya.

3. Syarat Ekonomi

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisiensi dan didasarkan pada fungsi *budgeter* dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekankan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan;

5. Syarat pemungutan harus sederhana

Sistim yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya.

Adapun sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam antara lain :

- *Official Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- *Self Assessment*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- *With Holding System*

Yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya wajib pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pemungutan pajak pada Bab IV Bagian Kesatu menyebutkan : Pemungutan pajak dilarang diborongkan, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggugurkan SKPD.

Dari beberapa pengertian tentang pemungutan pajak dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak masih didasarkan pada aspek keadilan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan aspek ekonomi dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang sedang terjadi, sedangkan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama menurut KJ. Davey yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

1. prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.

3. administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
4. secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. *Tax basenya* harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, dipertimbangkan optimalisasi ketepatan dalam membayar pajak. Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Fungsi dimaksud menurut Rochmat Soemitro dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulator.

1. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
2. Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor

dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

3. Untuk menanggulangi inflasi dimana dapat dilakukan apabila tepat penggunaannya sehingga merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara.

Dari sekian sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah. Sehingga setiap daerah tentunya memiliki sumber potensi pendapatan yang berbeda-beda, semakin tinggi tingkat kemampuan keuangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah tentunya akan berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan, secara otomatis akan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan, untuk mengklasifikasikan semua potensi pajak daerah, apa tergolong berkembang, potensial maupun terbelakang sehingga dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan teknologi yang sekarang dikembangkan di Kabupaten Sleman diharapkan bisa memberikan kemudahan dan pengawasan sehingga masyarakat bisa mengakses informasi tersebut secara transparan dan akan meningkatkan kepercayaan tentang pengelolaan pajak yang sebenarnya.

2.2. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retibusi daerah bahwa pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2001 (pasal 1 ayat 1) tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian pajak menurut Rachmat Sumitro (Mardiasmo, 2000;1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kemudian pajak daerah menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapat mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari berbagai pendapat tentang pengertian pajak daerah dapat disimpulkan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan pribadi atau badan dengan tidak mendapat imbalan dan dipergunakan untuk keperluan daerah khususnya untuk kesejahteraan dan pembangunan.

Pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip hukumnya, misalnya mengenai subyek, obyek dan lain sebagainya. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan pengenaan pajak.

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah propinsi sebanyak 4 jenis yang terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
5. Pajak merokok

Sedangkan untuk daerah tingkat kabupaten/kota terdiri atas 11 jenis pajak yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan c
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sementara yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah dan yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Undang-Undang 28 Tahun 2009).

Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan bertitik tolak pendapat Adam Smit dan ekonom-ekonom yang lain, maka menurut Musgrave haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
2. Distribusi beban pajak harus adil;
3. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
4. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimum penyelewengan
5. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi
6. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas
7. Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Melihat definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hakekat pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

2.3. Produk Domestik Bruto Regional (PDRB)

PDRB adalah salah satu ukuran kemakmuran suatu wilayah dipandang dari sudut ekonomi, sedangkan angka PDRB dibagi jumlah penduduk yang dikenal dengan PDRB perkapita merupakan indikator ekonomi makro yang sering digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai tingkat kemakmuran masyarakat. Namun demikian angka ini belum mencerminkan nilai yang betul-betul diperoleh oleh masyarakat (pendapatan perkapita).

Untuk mendapatkan nilai pendapatan perkapita tidaklah mudah, nilai pendapatan perkapita diperoleh dari total PDRB dikurangi pajak tak langsung netto yang mengalir dari/ke luar daerah dikurangi pajak pendapatan perusahaan dikurangi keuntungan yang tidak dibagikan dikurangi iuran kesejahteraan sosial ditambah transfer yang diterima oleh rumah tangga ditambah bunga netto atas bunga pemerintah dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang dipakai pada publikasi ini adalah hasil sensus penduduk tahun 2010 dan dilakukan estimasi kebelakang. (PDRB LU, 2009-2011)

Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Sleman atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir ini selalu menunjukkan terjadinya peningkatan. Seperti terlihat pada tabel 1.6, pada tahun 2007 PDRB per kapita atas harga berlaku Kabupaten Sleman sebesar Rp. 9,42 juta dan meningkat menjadi Rp. 13,63 juta di tahun 2011. Di tahun 2011 PDRB per kapita Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 9,49 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1
PDRB Per kapita Harga Berlaku dan Konstan serta Pertumbuhannya
di Kabupaten Sleman Tahun 2007 - 2011

Thn	PDRB per kapita Berlaku		PDRB per Kapita Konstan	
	Nilai (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
2007	9,42	10.96	5.25	3.57
2008	10,71	13.66	5.46	4.10
2009	11,59	8.19	5.65	3.47
2010	12,45	7.48	5.83	3.16
2011	13,63	9.49	6.05	3.84
	Jumlah	49.78	28.24	18.14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman

2.4. Penelitian sebelumnya.

Penelitian sejenis tentang pajak daerah telah banyak dilakukan, namun dalam kenyataannya setiap hasil penelitian tidaklah selalu sama karena obyek yang dilakukan mempunyai kemajemukan dan karakter daerah yang berbeda-beda, sehingga output yang dihasilkan juga berbeda.

- 1 Dhinaryati (2002), dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah di Kota Surakarta”. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis efisiensi dan efektifitas pendapatan asli daerah di Kota Surakarta menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta telah efektif dan efisien hal ini ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi PAD Kota Surakarta karena sudah tepatnya sistem pemungutan yang dilaksanakan. (Dhinaryati, 2002: 64-72).
- 2 Rosdiana (2000), dengan judul: “Analisis mengenai derajat fiskal dan potensi penerimaan daerah di Kabupaten Bantul” Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap total penerimaan daerah di Kabupaten Bantul masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata derajat fiskal selama 9 tahun terakhir menunjukkan angka 21,18 persen. Selain itu terlihat bahwa Kabupaten Bantul mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat yakni sebesar 66,42%. Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah yang masih rendah mencerminkan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer ataupun bantuan dari pusat. Hasil perhitungan masing-masing komponen PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan komponen yang paling dominan sebagai penyumbang PAD selama beberapa tahun terakhir.
- 3 Astuti (2008), dengan judul “Dampak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar, hasil penelitian menunjukkan bahwa : Retribusi pelayanan kesehatan, pajak hotel dan restoran serta retribusi tempat rekreasi dan olah raga secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar sedangkan retribusi pelayanan kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap PAD, pajak hotel dan restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, retribusi tempat rekreasi dan olah raga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

- 4 Ika Erlina (2006), dengan judul Tesis “ Analisis Optimalisasi Pajak Reklame Di Kabupaten Temanggung” hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pajak reklame di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 menunjukkan bahwa nilai efisiensi yaitu dibawah 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangat efisien sedangkan tingkat efektifitas pajak reklame di Kabupaten Temanggung tidak efektif yaitu sebesar 21,38%, nilai efektivitas yang kurang dari 60%. Yang berarti bahwa nilai penerimaan pajak reklame dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 lebih kecil dari nilai potensinya, untuk hasil elastisitas penerimaan pajak reklame menunjukkan bahwa pada Tahun 2003 dan Tahun 2004 elastisitasnya negatif yaitu sebesar -0,0094 dan -0,0007, elastisnya bersifat inelastis atau nilai $e < 1$, sehingga pada tahun tersebut potensi pajak reklame adalah lemah dan mengalami kesulitan dalam hal pemungutan pajak reklame.

2.5. Kerangka Pemikiran Konseptual

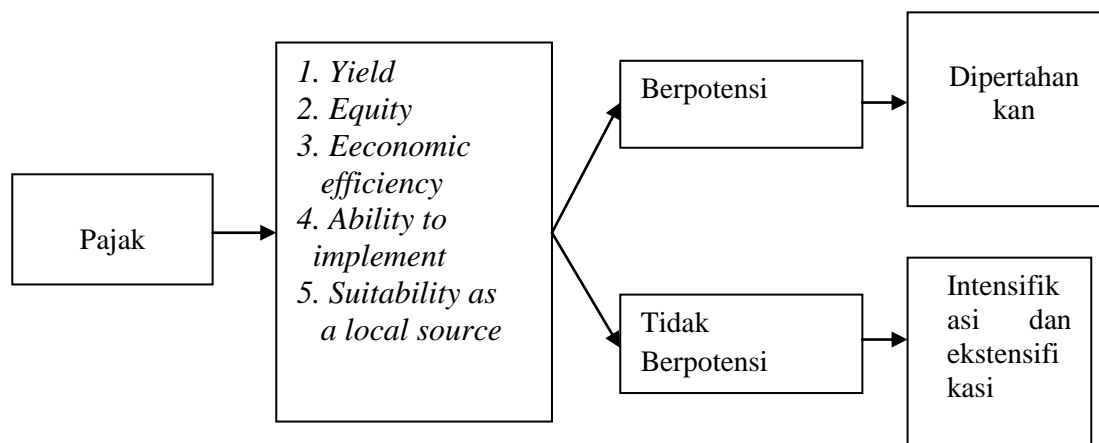
Pajak Daerah mempunyai peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*bugetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulator*), sebagai sumber pendapatan setiap pajak harus memenuhi unsur keadilan, kepastian, kelayakan, efisiensi dan unsur ketepatan. (Halim, 2004)

Pada umumnya setiap kegiatan pemungutan pajak dapat dikaji atau dinilai menurut dampaknya terhadap aspek efisiensi (tingkat output yang dihasilkan dan aspek distribusi (pemerataan beban dan manfaat). Aspek efisiensi dapat dilihat dari jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah apakah mempunyai dampak terhadap jumlah produksi atau penghasilan masyarakat.

Penarikan atau pungutan pajak daerah harus bersifat ekonomis, efisien dan adil (*economic, efficiency and equity*) namun juga harus sederhana dalam sistem administrasinya. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk

memperbaiki sistem pengumpulan pajak daerah agar bisa meningkatkan PAD antara lain:

1. Dimilikinya sistem akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang dikumpulkan telah diposting ke rekening pemerintah daerah secara benar, dan ada keamanan yang cukup dari bahaya pencurian, hilang atau salah hitung.
2. Checking sistem, pada setiap tahap sangat perlu bahwa catatan-catatan tersebut di *Cross-Checked*, dan pengecekan mendadak (*Spot Check*) dilakukan oleh *staff* senior secara acak.
3. Pelaporan hasil pengumpulan PAD perlu dimonitor secara teratur dibandingkan dengan target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan mengambil keputusan bila terjadi masalah.
4. Metode menghitung potensi PAD yang efektif. (Mardiasmo, 2001)



Gambar 2.1
Penarikan/pungutan pajak daerah

Sementara untuk melihat kinerja pendapatan/penerimaan daerah, berdasarkan model penyusunan program dan strategi anggaran, dalam Wisnu Untoro Dkk. (2000) dapat ditentukan oleh beberapa indikator / kriteria 1) *Pertumbuhan*, Pertumbuhan penerimaan daerah merupakan indikator untuk melihat sejauh mana perkembangan suatu ayat penerimaan dari tahun ketahun. Pertumbuhan dapat meningkat atau menurun dan biasanya dinyatakan dalam prosentase. (2) *Kontribusi / Proporsi* dari ayat pajak daerah merupakan peranan atau sumbangan yang diukur dalam bentuk

prosentase suatu ayat penerimaan terhadap total ayat penerimaan (pajak) terhadap total penerimaan asli daerah (PAD). Semakin besar angka kontribusinya ini berarti semakin bermakna sumbangan ayat penerimaan daerah tersebut dalam membentuk total penerimaan (pajak) atau total PAD.

Selanjutnya untuk menilai Kinerja Ayat penerimaan Daerah, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan potensi (mengklasifikasi) ayat penerimaan menjadi 4 klasifikasi yaitu: **(1) Penerimaan Prima**, jika ratio tambahan (pertumbuhan) jenis pajak daerah keduanya lebih besar atau sama dengan satu, **(2) Penerimaan Potensial**, jika ratio tambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu. **(3) Berkembang**, jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu. **(4) Terbelakang** jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah dan ratio proporsinya atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau sama dengan satu (Masykur Wiratmo, makalah, 2001).

Jika diperhatikan untuk menentukan klasifikasi jenis pajak diperlukan dua indikator pokok, yaitu: (1) *Ratio Proporsi*, ini merupakan perbandingan antara realisasi suatu ayat pajak dengan rerata pajak daerah. Rerata pajak dapat dihitung dari jumlah seluruh pajak atau retribusi dibagi dengan jumlah ayat pajak (2) *Ratio tambahan Pertumbuhan*, ratio ini membandingkan pertumbuhan ayat pajak dengan pertumbuhan total pajak.

Peningkatan penerimaan pajak akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan sangat berpengaruh terhadap sumber keuangan daerah yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah pada khususnya dan umumnya pembangunan nasional. Besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa efisien dan seberapa efektifnya penerimaan pajak yang dapat disumbangkan pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif, dilaksanakan di Kabupaten Sleman, dengan rentang waktu penelitian dari Tahun 2007-2011 dengan obyek penelitian analisis pajak daerah di Kabupaten Sleman, dengan

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 1999). Beberapa data sekunder yang diharapkan dapat memberikan masukan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi yaitu mempelajari beberapa dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.

3.3. Alat Analisis

Untuk menganalisis optimalisasi penerimaan pajak daerah tentunya banyak cara yang digunakan, tergantung obyek atau permasalahan apa yang akan diteliti. Karena pajak parkir merupakan bagian dari pajak daerah yang ada di tingkat kabupaten, maka pelaksanaannya dan pengelolaannya harus dioptimalkan sehingga input dan output bisa dirasakan secara nyata.

1. Analisis Matriks Kontribusi dan Pertumbuhan

Analisis Matriks Kontribusi dan pertumbuhan adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung besarnya sumbangan dari sektor tertentu terhadap sektor lainnya yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya sumbangan yang dapat diberikan dari sektor tersebut dan sebagai alat untuk menentukan dalam kategori apa sektor tersebut berada dalam peranannya dalam memberikan sumbangan terhadap sektor yang lain apakah prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Perhitungan matriks kontribusi pada variabel penerimaan pajak daerah terhadap

PAD dapat dilakukan melalui perbandingan antara Penerimaan pajak daerah dengan Pertumbuhan PAD, sehingga dari analisis tersebut dapat disimpulkan apakah peranan penerimaan pajak daerah Terhadap PAD bersifat Prima, Potensial, berkembang atau Terbelakang.

Analisis data dengan menggunakan : ratio pertumbuhan, ratio tambahan, proporsi, sedangkan untuk menentukan klasifikasi jenis pajak atau retribusi digunakan hubungan ratio-ratio dalam tabel :

Tabel 3.1
Rumus untuk Klasifikasi Jenis Pajak atau Retribusi Daerah

Ratio Proporsi Ratio Tambahan	X/rerata >1	X / rerata <1
$X1 / X2 >1$	Prima	Berkembang
$X1 / X2 <1$	Potensial	Terbelakang

Keterangan:

1. Ratio Proporsi merupakan perbandingan antara realisasi suatu ayat pajak atau retribusi dengan Rerata pajak atau retribusi.

Rumus:

$$RatioProporsi = \frac{Nilaiayat pajak}{Rerata Pajak / retribusi}$$

2. Ratio Tambahan (Pertambahan pertumbuhan) adalah perbandingan antara pertumbuhan ayat pajak / retribusi dengan pertumbuhan total pajak / retribusi,

$$RatioTambahan = \frac{Pertumbuhan ayat pajak / retribusi (X1)}{Pertumbuhan Total Pajak / X2}$$

Dimana:

$$Pertumbuhan ayat (X1) = \frac{Pajak X1 - Pajak X_{(1-1)}}{Pajak / Ret X_{(1-1)}}$$

Dimana: Pajak / ret. Xi = Pajak/Ret. Tahun ini (2003)

Pajak / Ret. X(i-i)= Pajak / Ret. Tahun lalu (2002)

3. Analisis elastisitas untuk mencari elastisitas masing-masing pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB dengan *menggunakan rumus* :

$$PAD = \frac{\Delta PD}{\Delta PAD} \times \frac{PAD}{PD}$$

$$PAD = \frac{\Delta PD}{\Delta PDRB} \times \frac{PDRB}{PD}$$

2. Variabel Keadilan (*Equity*), efisiensi (*economic efficiency*), kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*) dan variabel kesesuaian sebagai penerimaan daerah (*Suitability as a Local Source*).

BAB IV

ANALISA DATA

Pada bab ini akan dibahas analisis terhadap data sekunder hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, dengan obyek penelitian adalah penerimaan pajak daerah tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

4.1 Deskripsi Pajak Daerah

Upaya untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diarahkan pada usaha-usaha yang mengacu pada upaya peningkatan pendapatan daerah, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber dari pemerintah pusat, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi bagian terbesar dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan di daerah

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang merupakan instansi pelaksana dibidang pengelolaan pendapatan daerah dituntut untuk menggali dan meningkatkan potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah yang diantaranya adalah pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 menyebutkan jenis pajak yang dapat dikelola oleh kabupaten/kota meliputi 11 (sebelas komponen) yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Untuk mengetahui pajak Daerah Kabupaten Sleman beserta realisasinya dapat dilihat pada Tabel. 4.1

Tabel 4.1
Target Pajak Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2007 – 2011

No.	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Pajak Hotel	10,000,000,000	11,000,000,000	12,500,000,000	21,326,096,600	22,000,000,000
2	Pajak restoran	4,500,000,000	5,100,000,000	6,000,000,000	8,668,000,000	13,000,000,000
3	Pajak Hiburan	1,500,000,000	2,300,000,000	2,600,000,000	3,500,000,000	3,200,000,000
4	Pajak Reklame	4,500,000,000	5,621,622,443	6,800,000,000	8,600,000,000	8,750,000,000
5	Pajak Pen. Jalan	20,500,000,000	24,000,000,000	27,200,000,000	32,500,000,000	38,400,000,000
6	Pajak PPBGGC	600,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	3,000,000,000
7	Pajak Parkir	400,000,000	500,000,000	600,000,000	725,000,000	850,165,400
8	Pajak Air Tanah					1,000,000,000
9	BPHTP					32,500,000,000
	Jumlah	42,000,000,000	49,171,622,443	56,350,000,000	75,969,096,600	122,700.165.400
	Rata-Rata	6,000,000,000	7,024,517,492	8,050,000,000	10,852,728,086	11,275,020,675

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap pendapatan asli daerah. Maka penerimaan pajak harus dikelola secara efektif dan efisien agar penerimaan pajak daerah terus meningkat. Dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang terus meningkat diharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman mampu dan mandiri untuk melakukan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dan sekaligus mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Kenaikan pajak daerah tersebut secara kumulatif cenderung mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Pada awal tahun penelitian yaitu pada tahun 2007 pajak daerah di Kabupaten Sleman mampu menyumbang pendapatan asli daerah sebesar Rp 42,000,000,000,- dan berkembang menjadi Rp 122.700.165.400 pada tahun 2011 terjadi kenaikan 100% lebih. Perkembangan tersebut tentunya mengikuti perkembangan pertumbuhan ekonomi seiring dengan pesatnya pertumbuhan di sektor pariwisata di Kabupaten Sleman yang akan menaikkan pajak daerah pada sektor-sektor tertentu seperti pajak hotel dan restoran.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa sektor yang menyumbang pajak paling tinggi adalah pajak penerangan jalan dan pajak hotel yang melebihi penerimaan lainnya di Kabupaten Sleman.

4.2 Persentase Kenaikan Perkembangan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikelola dan dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan usaha untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Secara komulatif persentase komulatif perkembangan pajak daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Persentase Kenaikan Pajak Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2007 - 2011

No.	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Pajak Hotel	1,000,000,000	1,500,000,000	8,826,096,600	673,903,400
2	Pajak restoran	600,000,000	900,000,000	2,668,000,000	4,332,000,000
3	Pajak Hiburan	800,000,000	300,000,000	900,000,000	(300,000,000)
4	Pajak reklame	1,121,622,443	1,178,377,557	1,800,000,000	150,000,000
5	Pajak Pen.Jalan	3,500,000,000	3,200,000,000	5,300,000,000	5,900,000,000
6	Pajak PPBGGC	50,000,000	-	-	2,350,000,000
7	Pajak Parkir	100,000,000	100,000,000	125,000,000	125,165,400
8	Pajak Air Tanah				1,000,000,000
9	BPHTP				32,500,000,000
	Jumlah	7,171,622,443	7,178,377,557	19,619,096,600	13,231,068,800
	Rata-Rata	1,024,517,492	1,025,482,508	2,802,728,086	1,778,883,600

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah di Kabupaten Sleman sangat variatif dan tergantung kondisi dan tingkat keramaian. Dari tabel tersebut diatas persentase kenaikan kontribusi terbesar dalam kurun waktu lima tahun adalah pajak penerangan jalan, namun dengan adanya pajak BPHTP pada tahun 2011 pajak penerangan jalan masih dibawah dari pada pajak BPHTP.

Dengan realisasi tersebut diatas yang terpenting adalah bagaimana bisa mempertahankan potensi kenaikan dari masing-masing sektor yang diikuti adanya pengendalian dan pengawasan yang secara terus menerus dan berusaha meminimalisir terjadi kebocoran-kebocoran. Sehingga harapan kedepan biaya kegiatan pembangunan dan pemerintahan tidak sepenuhnya tergantung pemerintah

pusat namun bisa memanfaatkan potensi dari sektor pajak daerah dan sektor-sektor lainnya seperti pajak retribusi yang menduduki peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan pajak daerah.

4.3 Analisis Perhitungan Pertambahan, Ratio Pertumbuhan dan Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2007 – 2011

Dimensi potensi yang dimaksud di sini baru mengacu pada tataran mencari kecenderungan-kecenderungan dari berbagai macam/jenis pajak daerah yang selama ini pernah dan sedang diberlakukan di Kabupaten Sleman, yang selama ini terjadi terhadap penetapan anggaran pada pos pendapatan daerah, yaitu bahwa penetapan target-target dari setiap jenis pendapatan daerah hanya didasarkan atas proses *incremental* (peningkatan) sebesar sekian persen (rata-rata 10%) dibanding tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan pada potensi yang dimiliki. Apabila kesenjangan antara potensi dan realisasi dikatakan sebagai kesenjangan obyektif, maka upaya pengkajian terhadap potensi pendapatan daerah perlu dievaluasi dan perlu di kaji.

Sebagai sumber penerimaan yang ideal, maka pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan *assesment* potensi keuangan daerah, yang dimaksud adalah merupakan kekuatan yang ada pada suatu daerah, untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Sejauh mana pajak daerah tersebut dapat menjadi kekuatan atau sumber penerimaan, bisa dilihat sejauh mana kinerja potensinya.

Kinerja atau *performence* merupakan suatu proses kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan, termasuk informasi efisiensi penggunaan sumber dan perbandingannya dengan target, efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Robertson, 2002). Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja (outcomes of Work) yang memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan strategik organisasi dalam kontribusi ekonomi. (Roger, 1994).

Penarikan atau pungutan pajak daerah daerah harus bersifat ekonomis, efisien dan adil (economic, efficiency and equity) namun juga harus sederhana dalam sistem administrasinya. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk

memperbaiki sistem pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah agar bisa meningkatkan PAD antara lain:

1. Dimilikinya sistem Akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang dikumpulkan telah diposting ke rekening pemerintah daerah secara benar, dan ada keamanan yang cukup dari bahaya pencurian, hilang atau salah hitung.
2. Checking sistem, pada setiap tahap sangat perlu bahwa catatan-catatan tersebut di Cross-Checked, dan pengecekan mendadak (Spot Check) dilakukan oleh staff senior secara acak.
3. Pelaporan hasil pengumpulan PAD perlu dimonitor secara teratur dibandingkan dengan target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan mengambil keputusan bila terjadi masalah.
4. Metode menghitung potensi PAD yang efektif. (Mardiasmo, 2001)

Sementara untuk melihat Kinerja Pendapatan / penerimaan daerah, berdasarkan model Penyusunan Program dan Strategi Anggaran, dalam Wisnu Untoro Dkk. (2000) dapat ditentukan oleh beberapa indikator / kriteria 1) *Pertumbuhan*, Pertumbuhan penerimaan daerah merupakan indikator untuk melihat sejauh mana perkembangan suatu ayat penerimaan dari tahun ketahun. Pertumbuhan dapat meningkat atau menurun dan biasanya dinyatakan dalam prosentase. (2) *Kontribusi / Proporsi* dari ayat penerimaan daerah merupakan peranan atau sumbangan yang diukur dalam bentuk prosentase suatu ayat penerimaan terhadap total ayat penerimaan (pajak) terhadap total penerimaan asli daerah (PAD). Semakin besar angka kontribusinya ini berarti semakin bermakna sumbangan ayat penerimaan daerah tersebut dalam membentuk total penerimaan (pajak) atau total PAD.

Selanjutnya untuk menilai kinerja ayat penerimaan daerah, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan potensi (mengklasifikasi) ayat penerimaan menjadi 4 klasifikasi yaitu: (1) **Penerimaan Prima**, Jika ratio tambahan (pertumbuhan) jenis pajak daerah keduanya lebih besar atau sama dengan satu, (2) **Penerimaan Potensial**, jika ratio tambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak

daerah lebih besar atau sama dengan satu. (3) **Berkembang**, jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu. (4) **Terbelakang** jika ratio Pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah dan ratio proporsinya atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau sama dengan satu (Masykur Wiratmo, makalah, 2001).

Jika diperhatikan untuk menentukan klasifikasi jenis pajak diperlukan dua indikator pokok, yaitu: (1) Ratio Proporsi, ini merupakan perbandingan antara realisasi suatu ayat pajak dengan rerata pajak daerah. Rerata pajak dapat dihitung dari jumlah seluruh pajak dibagi dengan jumlah ayat pajak/retribusi. (2) *Ratio tambahan Pertumbuhan*, ratio ini membandingkan pertumbuhan ayat pajak dengan pertumbuhan total pajak.

Alternatif kebijakan atau upaya yang dapat diambil atau diterapkan dalam usaha meningkatkan setiap jenis klasifikasi yang disebut diatas akan berbeda-beda. Jika jenis pajak atau retribusi termasuk prima, maka kebijaksanaan yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat tetap digunakan dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya. Jika Potensial, maka upaya yang perlu dilakukan adalah mengintensifkan pemungutan dari sumber penerimaan yang ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan. Untuk pajak dengan klasifikasi Berkembang, upaya peningkatan yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber baru dengan tingkat pertumbuhan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jika pajak atau retribusi dalam klasifikasi terbelakang, maka upaya peningkatannya dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru dan meningkatkan penerimaan dari tahun sebelumnya dari sumber peneriman yang ada.

Pada penelitian ini menggunakan data perolehan dari pajak daerah tahun 2007 dan perkembangan perolehan tahun 2011. berikut perolehan dari masing-masing ayat pajak dan retribusi:

Tabel 4.3
Rasio Pertumbuhan, Pertambahan dan Ratio Proporsi Pajak Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2007 – 2008

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2007	Tahun 2008	Pertum.	Ratio Pertamb.	Elastisitas	Ratio Prop
1	Pajak Hotel	10,000,000,000	11,000,000,000	9.09	0.62	0.36	1.57
2	Pajak restoran	4,500,000,000	5,100,000,000	11.76	0.81	0.13	0.73
3	Pajak Hiburan	1,500,000,000	2,300,000,000	34.78	2.38	0.02	0.33
4	Pajak reklame	4,500,000,000	5,621,622,443	19.95	1.37	0.08	0.80
5	Pajak Pen. Jalan	20,500,000,000	24,000,000,000	14.58	1.00	0.49	3.42
6	Pajak PPBGGC	600,000,000	650,000,000	7.69	0.53	0.03	0.09
7	Pajak Parkir	400,000,000	500,000,000	20.00	1.37	0.01	0.07
8	Pajak Air Tanah						
9	BPHTP						
	Jumlah	2,000,000,000	49,171,622,443	14.58	8.08	1.1	7.0
	Rata-Rata	6,000,000,000	7,024,517,492	16.84	1.15	0.16	1.00

Sumber Data Pajak Daerah: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Dengan mendasarkan pada tabel tersebut maka, khususnya menghubungkan antara ratio tambahan dengan ratio proporsi pajak daerah, maka dapat ditentukan klasifikasi potensi pajak daerah pada tahun 2007 sampai tahun 2008 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pajak Hotel, dengan ratio tambahan 0,62 dan ratio Proporsi 1,57 maka pajak hotel termasuk Pajak Potensial . (2) Pajak Restoran dengan ratio tambahan 0,81 dan ratio proporsi 0,63 maka pajak Restoran termasuk Pajak Terbelakang. (3) Pajak Hiburan, dengan ratio tambahan 2,38 dan ratio proporsi 0,33 maka pajak hiburan juga termasuk pajak berkembang. (4) Pajak Reklame dengan ratio tambahan 1,37 dan ratio proporsi 0,80 maka pajak Reklame termasuk Pajak Berkembang. (5) Untuk Pajak Penerangan Jalan, dengan ratio tambahan 1,00 dan proporsi 3,42 maka pajak Penerangan jalan termasuk Pajak Prima, (6) Pajak Galian C. dengan ratio tambahan 0,53 serta proporsinya hanya 0,0039, maka pajak galian C termasuk Pajak Terbelakang dan (6) Pajak Parkir, dengan ratio tambahan 1,37 serta proporsinya hanya 0,07 maka pajak Parkir termasuk Pajak Berkembang.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pajak daerah dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kenaikan target. Sedangkan untuk mengetahui potensi yang sebenarnya, dari sumber penerimaan dengan analisis kinerja dengan menggunakan ratio tambahan pertumbuhan dengan proporsi masing-masing ayat sehingga potensi itu dapat dikalifikasikan dengan kategori: prima, potensial, berkembang, maupun Terbelakang.

Untuk penerimaan pajak, pertumbuhan yang dicapai dari tahun 2007 ke 2008 mencapai 14.58% dengan rata-rata pendapatan tahun 2008 dari masing-masing ayat pajak sebesar Rp. 49,171,622,443 ,- Dari ke-7 jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Sleman maka hanya ada satu pajak daerah yang klasifikasi potensial yaitu Pajak hotel, satu masuk dalam katagori klasifikasi Prima yaitu pajak penerangan jalan, empat masuk dalam katagori berkembang yaitu pajak hiburan, reklame dan pajak parkir serta dua masuk dalam klasifikasi terbelakang yaitu pajak restoran dan pajak galian C.

Jika termasuk dalam kategori Prima, maka harus dipertahankan, jika termasuk dalam kategori potensial, maka yang dilakukan adalah mengintensifkan yang sudah ada biar tercapai pertumbuhan. Jika termasuk penerimaan berkembang, maka harus dilakukan langkah ekstensifikasi, dan jika termasuk yang terbelakang, maka justru perlu adanya evaluasi, apakah sumber penerimaan yang menguntungkan atau jenis akan merugikan.

Tabel 4.4
Rasio Pertumbuhan, Pertambahan dan Ratio Proporsi Pajak Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2008 – 2009

	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2008	Tahun 2009	Pertumb.	Ratio Pertamb	Elastisitas	Ratio prop
1	Pajak Hotel	11,000,000,000	12,500,000,000	12.00	0.94	0.31	1.78
2	Pajak restoran	5,100,000,000	6,000,000,000	15.00	1.18	0.12	0.85
3	Pajak Hiburan	2,300,000,000	2,600,000,000	11.54	0.91	0.07	0.37
4	Pajak reklame	5,621,622,443	6,800,000,000	17.33	1.36	0.12	0.97
5	Pajak Pen. Jalan	24,000,000,000	27,200,000,000	11.76	0.92	0.69	3.87
6	Pajak PPBGGC	650,000,000	650,000,000	-	-		0.09
7	Pajak Parkir	500,000,000	600,000,000	16,67	1,31	0,01	0.09
8	Pajak Air Tanah						
9	BPHTP						
	Jumlah	49,171,622,443	56,350,000,000	12.74	6.62	1.3	8.0
	Rata-Rata	7,024,517,492	8,050,000,000	12.04	0.95	0.22	1.15

Sumber Data Pajak Daerah : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Dengan mendasarkan pada tabel tersebut maka, khususnya menghubungkan antara ratio tambahan dengan ratio proporsi pajak daerah, maka dapat ditentukan klasifikasi potensi pajak daerah pada tahun 2008 sampai tahun 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pajak Hotel, dengan ratio tambahan 0,94 dan ratio

Proporsi 1,78 maka pajak hotel termasuk Pajak Potensial . (2) Pajak Restoran dengan ratio tambahan 1,18 dan ratio proporsi 0,85 maka pajak Restoran termasuk Pajak Berkembang. (3) Pajak Hiburan. Dengan ratio tambahan 0,91 dan ratio proporsi 0,37 maka pajak hiburan juga termasuk pajak Terbelakang. (4) Pajak Reklame dengan ratio tambahan 1,36 dan ratio proporsi 0,97 maka pajak Reklame termasuk Pajak Berkembang . (5) Untuk Pajak Penerangan Jalan, dengan ratio tambahan 0,92 dan proporsi 3,87 maka pajak Penerangan jalan termasuk Pajak Potensial, (6) Pajak Galian C. dengan ratio tambahan 0,53 serta proporsinya hanya 0,0039, maka pajak galian C termasuk Pajak Terbelakang dan (6) Pajak Parkir. dengan ratio tambahan 1,31 serta proporsinya hanya 0,09 maka pajak Parkir termasuk Pajak Berkembang.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pajak daerah dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kenaikan target. Sedangkan untuk mengetahui potensi yang sebenarnya, dari sumber penerimaan dengan analisis kinerja dengan menggunakan ratio tambahan pertumbuhan dengan proporsi masing-masing ayat sehingga potensi itu dapat dikalifikasikan dengan kategori: prima, potensial, berkembang, Maupun Terbelakang.

Untuk penerimaan pajak, pertumbuhan yang dicapai dari tahun 2008 ke 2009 mencapai 12,04% dengan rata-rata pendapatan tahun 2008 dari masing-masing ayat pajak sebesar Rp. 56,350,000,000,- Dari ke-6 jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Sleman maka Pajak hotel dan pajak penerangan jalan masuk dalam klasifikasi potensial, tiga masuk dalam klasifikasi berkembang yaitu pajak pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir sedangkan yang masuk klasifikasi terbelakang adalah pajak hiburan dan pajak galian C.

Jika termasuk dalam kategori Prima, maka harus dipertahankan, jika termasuk dalam kategori Potensial. Maka yang dilakukan adalah mengintensifkan yang sudah ada biar tercapai pertumbuhan. Jika termasuk penerimaan berkembang, maka harus dilakukan langkah ekstensifikasi, dan jika termasuk yang terbelakang, maka justru perlu adanya evaluasi, apakah sumber penerimaan yang menguntungkan atau akan merugikan.

Tabel 4.5
Rasio Pertumbuhan, Pertambahan dan Ratio Proporsi Pajak Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2009 – 2010

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2009	Tahun 2010	Pertumb.	Ratio Pertamb	Elastisitas	Ratio prop
1	Pajak Hotel	12,500,000,000	21,326,096,600	41.39	1.60	0.15	3.04
2	Pajak restoran	6,000,000,000	8,668,000,000	30.78	1.19	0.08	1.23
3	Pajak Hiburan	2,600,000,000	3,500,000,000	25.71	1.00	0.04	0.50
4	Pajak reklame	6,800,000,000	8,600,000,000	20.93	0.81	0.12	1.22
5	Pajak Pen. Jalan	27,200,000,000	32,500,000,000	16.31	0.63	0.59	4.63
6	Pajak PPBGGC	650,000,000	650,000,000	-	-	-	0.09
7	Pajak Parkir	600,000,000	725,000,000	17.24	0.67	0.01	0.10
8	Pajak Air Tanah						
9	BPHTP						
	Jumlah	56,350,000,000	75,969,096,600	25.83	5.90	1.0	10.8
	Rata-Rata	8,050,000,000	10,852,728,086	21.77	0.84	0.17	1.54

Sumber Data Pajak Daerah : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan pada tabel tersebut, dengan menghubungkan antara ratio tambahan dengan ratio proporsi pajak daerah, maka dapat ditentukan klasifikasi potensi pajak daerah pada tahun 2009 sampai tahun 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pajak Hotel, dengan ratio tambahan 1,60 dan ratio Proporsi 3,04 maka pajak hotel termasuk Pajak Prima. (2) Pajak Restoran dengan ratio tambahan 1,19 dan ratio proporsi 1,23 maka pajak Restoran termasuk Pajak Berkembang. (3) Pajak Hiburan. Dengan ratio tambahan 1,00 dan ratio proporsi 0,50 maka pajak hiburan juga termasuk pajak berkembang. (4) Pajak Reklame dengan ratio tambahan 0,81 dan ratio proporsi 1,22 maka pajak Reklame termasuk Pajak Potensial. (5) Untuk Pajak Penerangan Jalan, dengan ratio tambahan 0,63 dan proporsi 4,63 maka pajak Penerangan jalan termasuk Pajak Potensial, (6) Pajak Galian C. Tidak ada peningkatan target maka sesuai tabel dapat dikategorikan terbelakang karena dengan hasil nol (6) Pajak Parkir. dengan ratio tambahan 0,67 serta proporsinya hanya 0,10 maka pajak Parkir termasuk Pajak berkembang.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pajak daerah dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kenaikan target. Sedangkan untuk mengetahui potensi yang sebenarnya, dari sumber penerimaan

dengan analisis kinerja dengan menggunakan ratio tambahan pertumbuhan dengan proporsi masing-masing ayat sehingga potensi itu dapat dikalifikasikan dengan kategori: Prima, Potensial, berkembang, Maupun Terbelakang.

Untuk penerimaan pajak, pertumbuhan yang dicapai dari tahun 2009 ke 2010 mencapai 16,64% dengan rata-rata pendapatan tahun 2008 dari masing-masing ayat pajak sebesar Rp. 56,350,000,000,- Dari ke-6 jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Sleman maka Pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir yang potensial dapat masuk klasifikasi Prima, ada 1 yang berkembang dan 2 yang terbelakang.

Jika termasuk dalam kategori Prima, maka harus dipertahankan, jika termasuk dalam kategori Potensial. Maka yang dilakukan adalah mengintensifkan yang sudah ada biar tercapai pertumbuhan. Jika termasuk penerimaan berkembang, maka harus dilakukan langkah ekstensifikasi, dan jika termasuk yang terbelakang, maka justru perlu adanya evaluasi, apakah sumber penerimaan yang menguntungkan atau jenis akan merugikan.

Tabel 4.6
Rasio Pertumbuhan, Pertambahan dan Ratio Proporsi Pajak Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2010 – 2011

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2010	Tahun 2011	Pertumb .	Ratio Pertamb	Elastisitas	Ratio prop
1	Pajak Hotel	21,326,096,600	22,000,000,000	3.06	0.21	2.13	3.13
2	Pajak restoran	8,668,000,000	13,000,000,000	33.32	2.25	0.12	1.85
3	Pajak Hiburan	3,500,000,000	3,200,000,000	(9.38)	(0.63)	(0.10)	0.46
4	Pajak reklame	8,600,000,000	8,750,000,000	1.71	0.12	1.51	1.25
5	Pajak Pen. Jalan	32,500,000,000	38,400,000,000	15.36	1.04	0.74	5.47
6	Pajak PPBGGC	650,000,000	3,000,000,000	78.33	5.28	0.01	0.43
7	Pajak Parkir	725,000,000	850,165,400	14.72	0.99	0.02	0.12
8	Pajak Air Tanah		1,000,000,000	100.00			
9	BPHTP		32,500,000,000	100.00			
	Jumlah	75,969,096,600	89,200,165,400	14.83	9.25	4.4	12.7
	Rata-Rata	10,852,728,086	11,275,020,675	29.64	1.32	0.63	1.81

Sumber Data Pajak Daerah : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Pada tabel tersebut diatas maka, untuk menghubungkan antara ratio tambahan dengan ratio proporsi pajak daerah, maka dapat ditentukan klasifikasi potensi pajak daerah pada tahun 2010 sampai tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)

pajak hotel, dengan ratio tambahan 0,21 dan ratio proporsi 3,13 maka pajak hotel termasuk pajak potensial. (2) pajak restoran dengan ratio tambahan 2,25 dan ratio proporsi 1,85 maka pajak Restoran termasuk pajak berkembang. (3) pajak hiburan dengan ratio tambahan (0,63) dan ratio proporsi 0,46 maka pajak hiburan termasuk klasifikasi terbelakang. (4) pajak reklame dengan ratio proporsi tambahan sebesar 0,12 dan ratio proporsi 1,25 maka pajak Reklame termasuk klasifikasi potensial. (5) untuk pajak penerangan jalan, dengan ratio tambahan sebesar 1,04 dan ratio proporsi sebesar 5,47, maka pajak penerangan jalan termasuk klasifikasi prima, (6) pajak galian C dengan ratio tambahan sebesar 1,04 dan ratio proporsi sebesar 0,43 maka pajak galian C termasuk dalam klasifikasi berkembang (6) pajak parkir dengan ratio tambahan sebesar 0,99 serta ratio proporsinya hanya 0,12 maka pajak parkir termasuk dalam klasifikasi terbelakang.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pajak daerah dapat dikatakan cukup baik kalau jenis pajak daerah tersebut hanya didasarkan atas presentasi atau proses *incremental* (peningkatan), hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kenaikan target setiap tahunnya. Sedangkan untuk mengetahui potensi yang sebenarnya, dari sumber penerimaan dengan analisis kinerja dengan menggunakan ratio tambahan pertumbuhan dengan proporsi masing-masing ayat sehingga potensi itu dapat diklasifikasikan dengan kategori: prima, potensial, berkembang, maupun terbelakang.

Untuk penerimaan pajak, pertumbuhan yang dicapai dari tahun 2010 ke 2011 mencapai 14,83% dari rata-rata pendapatan ayat pajak daerah tahun 2011 sebesar Rp. 89,200,165,400, dari ke-6 jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Sleman maka Pajak Penerangan jalan termasuk dalam klasifikasi prima, pajak hotel dan pajak reklame dengan antara ratio pertambahan dengan ratio proporsi ada kenaikan signifikan maka masuk klasifikasi potensial, pajak restoran, pajak galian C dan pajak hiburan masuk dalam klasifikasi berkembang serta pajak parkir masuk dalam klasifikasi terbelakang.

Jika termasuk dalam kategori prima, maka harus dipertahankan, jika termasuk dalam kategori potensial, maka yang dilakukan adalah mengintensifkan yang sudah

ada biar tercapai pertumbuhan. Jika termasuk penerimaan berkembang, maka harus dilakukan langkah ekstensifikasi, dan jika termasuk yang terbelakang, maka justru perlu adanya evaluasi, apakah sumber penerimaan yang menguntungkan atau jenis akan merugikan.

4.4 Analisis Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB Tahun 2007 – 2011

Pengukuran elastisitas ini mampu menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat mengimbangi kenaikan dalam pengeluaran pemerintah dengan dasar pengenaan pajak selalu berkembang secara otomatis (Davey, 1988). Elastisitas ini mampu untuk melihat derajat kepekaan terhadap jumlah PDRB di Kabupaten Sleman Tahun 2007 sampai dengan 2011.

Untuk menghitung elastisitas penerimaan (EP) dapat dilakukan dengan membandingkan persentase perubahan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman dengan persentase perubahan jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Sleman dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan 2012

Tabel 4.7
Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB
Kabupaten Sleman Tahun 2010 - 2011

Tahun	PAD (Juta)	Pertumbuhan	PDRB (Juta)	Pertumb.	Elastisitas
2007	42,000,000,000	-	5,250,000	-	
2008	49,171,622,443	11	5,460,000	3.8	0.000421
2009	56,350,000,000	17	5,650,000	3.4	0.000435
2010	75,969,096,600	27	5,830,000	3.1	0.000363
2011	122,700,165,400	24	6,050,000	3.6	0.000198

Sumber Data Pajak Daerah : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai bahwa elastisitas realisasi penerimaan pajak tahun 2007 hingga 2011 dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Sleman pada tahun yang sama. Apabila hasilnya lebih besar dari pajak lain dan pada saat yang sama elastis terhadap PAD dan PRDB, maka pajak tersebut dikatakan sangat berpotensi (+2). Namun bila tidak elastis terhadap pengeluaran rutin dan PDRB, berarti berpotensi (+1). Sebaliknya bila lebih kecil dari kabupaten/kota lain

namun elastis, maka dikatakan tidak berpotensi (-1), dan bila pada saat yang sama, lebih kecil dan tidak elastis, maka disebut sangat tidak berpotensi (-2)

Dari hasil perhitungan elastisitas pajak daerah Kabupaten Sleman pada periode 2007 – 2011 terhadap PDRB atas dasar adalah jumlah nilai produksi pendapatan maupun pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap (harga pada tahun dasar) yang digunakan selama satu tahun. Dari hasil perhitungan tersebut pada tabel memiliki hasil positif maka dapat disimpulkan bahwa sangat berpotensi.

4.5 Analisis Equity (Keadilan Pajak)

Keadilan pajak terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintah yang mereka biayai sendiri. Keadilan dalam prinsip perpajakan adalah pemikiran tradisional. Sebab prinsip keadilan dalam perpajakan daerah, bahkan prinsip-prinsip lainnya, dapat digambarkan dalam hubungan antara pajak dengan *social welfare function*. Dengan kata lain, sebagai ganti atas prinsip keadilan, maka telah diintrodusir *social welfare function* yang dikaitkan dengan perpajakan daerah. Artinya berapapun pajak daerah ditetapkan, asal *social welfare* tidak mengalami penurunan, maka suatu penetapan pajak dikatakan tidak memiliki masalah dalam keadilan pungutan.

Variabel equity dapat diproksi dengan seberapa besar pertumbuhan dari setiap sumber-sumber pendapatan daerah. Semakin tinggi pertumbuhan maka semakin potensial dari sumber pendapatan tersebut. Dari hasil perhitungan secara rata-rata selama tahun penelitian tahun 2007 – 2011 dapat dijelaskan berdasarkan dari yang terbesar pertumbuhan sumbangan pada pajak daerah adalah pertumbuhan pajak parkir sebesar 24,56 persen, namun bila dianalisis secara seksama secara kumulatif perolehan pajak parkir pada tataran klasifikasi rendah bila disejajarkan dengan pajak daerah lainnya seperti perolehan dari pajak penerangan jalan dan pajak restoran, namun secara pertumbuhan mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2011 walaupun pada tahun-tahun tertentu tidak mengalami kenaikan. Kenaikan pertumbuhan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa komponen untuk dioptimalkan seiring dengan pertumbuhan sektor perekonomian.

Sedangkan pajak daerah yang mempunyai pertumbuhan terkecil adalah pajak hiburan yaitu sebesar 2,31 hal ini disebabkan karena adanya pembatasan-pembatasan dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga berpengaruh atau menekan tumbuhnya usaha-usaha pajak hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan selain pajak sangat potensial untuk dilakukan dan ditingkatkan sebagai sumber pendapatan pajak daerah di Kabupaten Sleman. Secara rinci dapat dilihat pada table

Tabel 4.8
Realisasi Sumber Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2007 -2011
(dalam ribuan rupiah)

No.	Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2007-2011					Rata-Rata Realisasi	Rata2 Pert.
		Tahun 2007	Tahun 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011		
1	Pajak Hotel	11,423,620,419	14,522,397,204	18,188,624,205	22,557,704,618	22,637,880,385	17,866,045,366	15.30
2	Pajak restoran	5,320,503,572	6,675,522,009	7,628,940,658	10,145,715,812	13,257,484,784	8,605,633,367	20.27
3	Pajak Hiburan	2,035,377,677	3,553,567,031	3,637,358,441	3,786,482,377	2,709,834,885	3,144,524,082	2.31
4	Pajak reklame	4,749,917,482	8,147,539,122	9,010,087,694	9,086,804,452	9,322,567,251	8,063,383,200	13.66
5	Pajak Pen. Jalan	25,705,707,427	26,921,123,335	31,190,111,489	33,619,390,346	40,022,094,803	31,491,685,480	10.36
6	Pajak PPBGGC	633,093,975	551,072,688	664,415,502	699,977,655	3,218,385,875	1,153,389,139	21.38
7	Pajak Parkir	419,445,180	650,094,300	725,394,650	770,208,454	1,441,196,382	801,267,793	24.56
8	Pajak Air Tanah					851,830,412	170,366,082	25.00
9	BPHTP					49,327,392,683	9,865,478,537	25.00
	Jumlah	50,287,665,732	61,021,315,689	71,044,932,638	80,666,283,713	142,788,667,460	81,161,773,046	21.78
	Average	7,183,952,247	8,717,330,813	10,149,276,091.14	11,523,754,816.18	15,865,407,495.52	10,687,944,293	19.95

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

4.6 Analisis Ability to Implement (Kemampuan Melaksanakan)

Kelayakan suatu daerah untuk melaksanakan pungutan dapat diketahui dari beberapa kriteria, yaitu apakah daerah tersebut memang daerah yang tepat untuk suatu pajak dibayarkan, tempat memungut pajak adalah tempat akhir beban pajak, dan pajak tidak mudah dihindari. Apabila suatu daerah memiliki ketiga kriteria tersebut, maka daerah tersebut layak sebagai daerah pemungut pungutan daerah. Kelayakan tersebut akan terlihat dengan kemampuan politis daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah, yaitu pemungutan pajak dan retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama wajib pajak. Selanjutnya, kemampuan secara politis akan diimplementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hasil dari kelayakan dan kemampuan administrasi tersebut, seharusnya terlihat dalam hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah dibandingkan

dengan potensi penerimaannya, menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pungutan.

Dipergunakannya alasan perbandingan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah, dengan argumentasi hubungan antara potensi dan realisasi menunjukkan kemampuan melaksanakan perpajakan daerah. Kemampuan untuk mencapai potensi apalagi melebihi potensi menunjukkan bahwa pajak daerah tersebut mudah dilaksanakan. Semakin tinggi realisasi dibandingkan potensinya, berarti semakin terlihat adanya kemampuan pada daerah untuk melaksanakan pajak daerah tersebut.

Pada kajian ini variabel Ability to Implement (Kemampuan Melaksanakan) digunakan parameter perbandingan antara realisasi dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini mengingat ketersediaan data potensi yang diproksi dengan target yang ditetapkan, dengan asumsi bahwa penetapan target perolehan sudah didasarkan pada potensi dari masing-masing sumber pendapatan. Dari olahan data rata-rata tahun 2007-2011 dapat dijelaskan bahwa : sumber pendapatan pajak daerah mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 1,70 disusul dengan pajak reklame dengan nilai sebesar 1,25 persen dan peringkat rata-rata ketiga sebesar 1,18 persen, hal ini sebenarnya masih banyak sumber-sumber potensial dari pajak daerah, khususnya pendapatan asli daerah yang bisa dikelola dan dikembangkan. Khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak daerah lainnya yang persentasenya tidak terlalu jauh perlu dioptimalkan. Secara rinci dapat dijelaskan persentasenya pada Tabel 4.9

Tabel 4.9
Target dan Realisasi Sumber Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2007 -2011

No.	Pajak Daerah	Tahun 2007			Tahun 2008		
		Target	Realisasi	R/T	Target	Realisasi	R/T
1	Pajak Hotel	10,000,000,000	11,000,000,000	1	12,500,000,000	14,522,397,204	1.16
2	Pajak restoran	4,500,000,000	5,100,000,000	1	6,000,000,000	6,675,522,009	1.11
3	Pajak Hiburan	1,500,000,000	2,300,000,000	2	2,600,000,000	3,553,567,031	1.37
4	Pajak reklame	4,500,000,000	5,621,622,443	1	6,800,000,000	8,147,539,122	1.20
5	Pajak Pen. Jalan	20,500,000,000	24,000,000,000	1	27,200,000,000	26,921,123,335	0.99
6	Pajak PPBGGC	600,000,000	650,000,000	1	650,000,000	551,072,688	0.85
7	Pajak Parkir	400,000,000	500,000,000	1	600,000,000	650,094,300	1.08
8	Pajak Air Tanah						
9	BPHTP						

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Lanjutan Tabel 4.10
Target dan Realisasi Sumber Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2007 -2011

Tahun 2009			R/T	Tahun 2010			R/T	Tahun 2011			R/T
Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	
12,500,000,000	18,188,624,205	1.46		21,326,096,600	22,557,704,618	1.06		22,000,000,000	22,637,880,385	1.03	
6,000,000,000	7,628,940,658	1.27		8,668,000,000	10,145,715,812	1.17		13,000,000,000	13,257,484,784	1.02	
2,600,000,000	3,637,358,441	1.40		3,500,000,000	3,786,482,377	1.08		3,200,000,000	2,709,834,885	0.85	
6,800,000,000	9,010,087,694	1.33		8,600,000,000	9,086,804,452	1.06		8,750,000,000	9,322,567,251	1.07	
27,200,000,000	31,190,111,489	1.15		32,500,000,000	33,619,390,346	1.03		38,400,000,000	40,022,094,803	1.04	
650,000,000	664,415,502	1.02		650,000,000	699,977,655	1.08		3,000,000,000	3,218,385,875	1.07	
600,000,000	725,394,650	1.21		725,000,000	770,208,454	1.06		850,165,400	1,441,196,382	1.70	
								1,000,000,000	851,830,412	0.85	
								32,500,000,000	49,327,392,683	1.52	

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman

4.7 Suitability as a Local Source (Kesesuaian Sebagai Penerimaan Daerah)

Kesesuaian yang dimaksudkan adalah seberapa besar daerah berhak untuk mendapatkan suatu pajak dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Apabila hanya sebagian saja yang berhak dimiliki oleh daerah, sedangkan sebagian lainnya menjadi hak pemerintahan yang lebih tinggi maka dikatakan bahwa pajak dan retribusi daerah tersebut tidak sesuai dengan pendapatan daerah. Dan karena seberapa besar yang menjadi hak pemerintah daerah atau seberapa hak pemerintah yang lebih tinggi ditentukan berdasarkan undang-undang, maka untuk mengetahui kesesuaian pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah, digunakan pendekatan kesesuaian dengan undang-undang pajak dan retribusi daerah.

Adapun Undang-undang dan peraturan terkait dengan Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Berdasarkan peraturan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman harus diteliti kesesuaiannya. Sehingga untuk kesesuaian sebagai pendapatan daerah digunakan ukuran sebagai berikut :

1. Dikatakan berpotensi sesuai sebagai pendapatan daerah bila pajak dan retribusi daerah tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Dikatakan tidak berpotensi sesuai sebagai pendapatan daerah bila pajak dan retribusi daerah bertentangan dengan salah satu undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Tabel 4.10
Ability to Implement Sumber-sumber Pajak Daerah
Pemerintah Provinsi DIY, Tahun 2007 – 2011

No.	Pajak Daerah	Tahun 2007		R/T	Tahun 2008		R/T	Tahun 2009
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1	Pajak Hotel	10,000,000,000	11,000,000,000	1	12,500,000,000	14,522,397,204	1.16	12,500,000,000
2	Pajak restoran	4,500,000,000	5,100,000,000	1	6,000,000,000	6,675,522,009	1.11	6,000,000,000
3	Pajak Hiburan	1,500,000,000	2,300,000,000	2	2,600,000,000	3,553,567,031	1.37	2,600,000,000
4	Pajak reklame	4,500,000,000	5,621,622,443	1	6,800,000,000	8,147,539,122	1.20	6,800,000,000
5	Pajak Pen. Jln.	20,500,000,000	4,000,000,000	1	7,200,000,000	6,921,123,335	0.99	27,200,000,000
6	Pajak PPBGGC	600,000,000	650,000,000	1	650,000,000	551,072,688	0.85	650,000,000
7	Pajak Parkir	400,000,000	500,000,000	1	600,000,000	650,094,300	1.08	600,000,000
8	Pajak Air Tanah							
9	BPHTP							

Lanjutan Tabel. 4.10

Tahun 2009	R/T	Tahun 2010		R/T	Tahun 2011		R/T
Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
18,188,624,205	1.46	21,326,096,600	22,557,704,618	1.06	22,000,000,000	22,637,880,385	1.03
7,628,940,658	1.27	8,668,000,000	10,145,715,812	1.17	13,000,000,000	13,257,484,784	1.02
3,637,358,441	1.40	3,500,000,000	3,786,482,377	1.08	3,200,000,000	2,709,834,885	0.85
9,010,087,694	1.33	8,600,000,000	9,086,804,452	1.06	8,750,000,000	9,322,567,251	1.07
31,190,111,489	1.15	32,500,000,000	33,619,390,346	1.03	38,400,000,000	40,022,094,803	1.04
664,415,502	1.02	650,000,000	699,977,655	1.08	3,000,000,000	3,218,385,875	1.07
725,394,650	1.21	725,000,000	770,208,454	1.06	850,165,400	1,441,196,382	1.70
					1,000,000,000	851,830,412	0.85
					32,500,000,000	49,327,392,683	1.52

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.10 tersebut diatas, karena pemungutan pajak daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan pembagian atau pengelompokan sudah jelas maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak tersebut berpotensi sesuai karena tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian tersebut diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Target penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman dari Tahun 2007 - 2011 terjadi kenaikan yang sangat signifikan sehingga perlu ditingkatkan penentuan target, tidak hanya berdasarkan *incremental* (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding tahun-tahun sebelumnya tetapi perlu dikaji dan dievaluasi dengan menyesuaikan tingkat pertumbuhan.
2. Klasifikasi potensi pajak sesuai dengan hasil analisis, jika termasuk dalam kategori prima, maka harus dipertahankan, jika termasuk dalam kategori potensial yang dilakukan adalah mengintensifkan yang sudah ada biar tercapai pertumbuhan, tetapi jika termasuk penerimaan berkembang, maka harus dilakukan langkah ekstensifikasi, dan yang tergolong terbelakang, maka justru perlu adanya evaluasi, apakah sumber penerimaan yang menguntungkan atau jenis akan merugikan.
3. Perhitungan elastisitas pajak daerah Kabupaten Sleman pada periode 2007 – 2011 terhadap PDRB adalah jumlah nilai produksi pendapatan maupun pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap (harga pada tahun dasar) yang digunakan selama satu tahun. Dari hasil perhitungan tersebut pada tabel memiliki hasil positif maka dapat disimpulkan bahwa sangat berpotensi.
4. Variabel *equity* dapat diproksi dengan seberapa besar pertumbuhan dari setiap sumber-sumber pendapatan daerah. Semakin tinggi pertumbuhan maka semakin potensial, hasil perhitungan rata-rata selama tahun penelitian tahun 2007 – 2011 dapat dijelaskan berdasarkan dari yang terbesar pertumbuhan sumbangan pada pajak daerah adalah pertumbuhan pajak parkir sebesar 24,56 persen, namun bila dianalisis secara seksama secara komulatif perolehan pajak parkir pada tataran klasifikasi rendah bila disejajarkan dengan pajak daerah lainnya seperti perolehan

dari pajak penerangan jalan dan pajak restoran, namun secara pertumbuhan mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

5. Pada kajian ini variabel *Ability to Implement* (Kemampuan Melaksanakan) digunakan parameter perbandingan antara realisasi dengan target yang ditentukan. Dari olahan data rata-rata tahun 2007-2011 dapat dijelaskan bahwa : sumber pendapatan pajak daerah mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 1,70 disusul dengan pajak reklame dengan nilai sebesar 1,25 persen dan peringkat rata-rata ketiga sebesar 1,18 persen, hal ini sebenarnya masih banyak sumber-sumber potensial dari pajak daerah, khususnya pendapatan asli daerah yang bisa dikelola dan dikembangkan.
6. *Suitability as a Local Source* (Kesesuaian Sebagai Penerimaan Daerah) pemungutan pajak daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan pembagian atau pengelompokan sudah jelas maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak tersebut berpotensi sesuai karena tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

5. 2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai masukan dan penulis mengajukan saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Dengan diketahuinya potensi dan tingkat pertumbuhan maka dapat menetapkan target rasionalnya sehingga dapat merencanakan dengan tepat target yang akan ditetapkan tidak hanya berdasarkan *incremental*.
2. Klasifikasi potensi pajak sesuai dengan hasil analisis, jika termasuk dalam kategori prima, maka harus dipertahankan dan potensial yang dilakukan adalah mengintensifkan yang sudah ada biar tercapai pertumbuhan, tetapi jika termasuk penerimaan berkembang, dan terbelakang, maka justru perlu adanya evaluasi, apakah sumber penerimaan yang menguntungkan atau jenis akan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Bachrul Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Pemerintah*; PP. No. 104 Tahun 2000 *tentang Dana Perimbangan*; PP. No. 105 Tahun 2000 *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*; PP. No. 106 Tahun 2000 *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*; PP. No. 107 Tahun 2000 *tentang Pinjaman Daerah*.
- Mardiasmo, 2000. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah*, BPFE. Yogyakarta.
- M. Suparmoko. 2000. *Otonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 1997. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
- Republik Indonesia. 1999. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. 2000. UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Republik Indonesia. 2001. PP No. 65 – 66 tahun 2001 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Republik Indonesia. 2004. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyuni, 2010. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Yogyakarta